



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



PENDAHULUAN

Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



REKAP RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2021



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**



PENUTUP

Renja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten Tahun 2021



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, merupakan titik tolak pelaksanaan perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu maupun antar fungsi pemerintahan daerah.

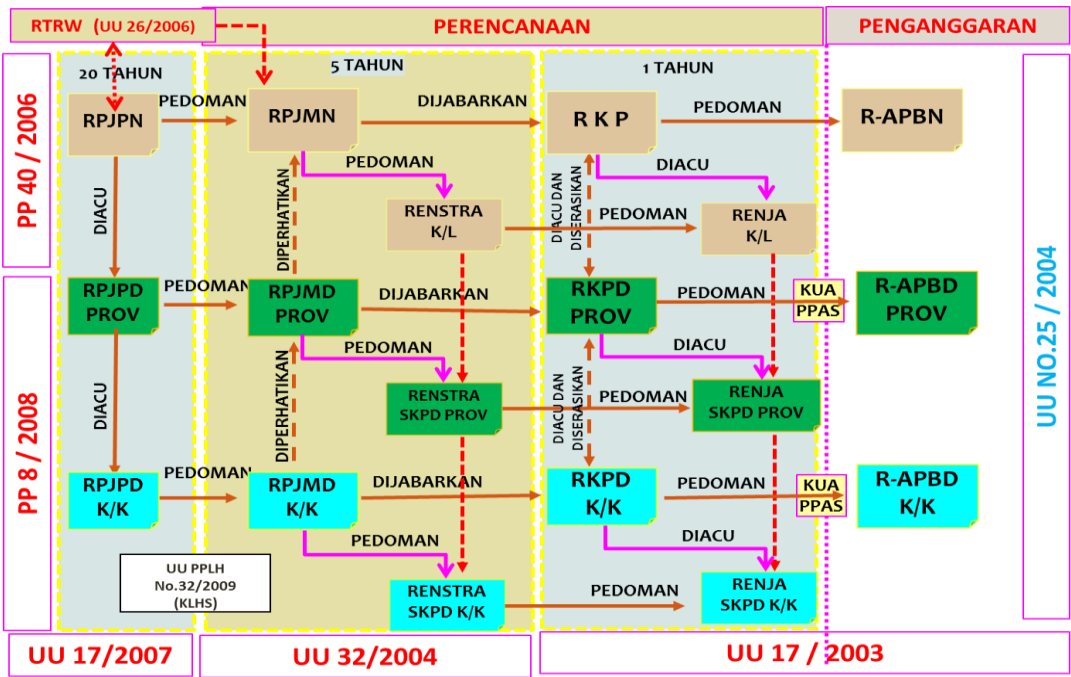
Dengan adanya PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Perda no 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Dimana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan. sebagai salah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja OPD merupakan penjabaran Renstra OPD yang mengacu pada RKPD. Renja OPD memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran.

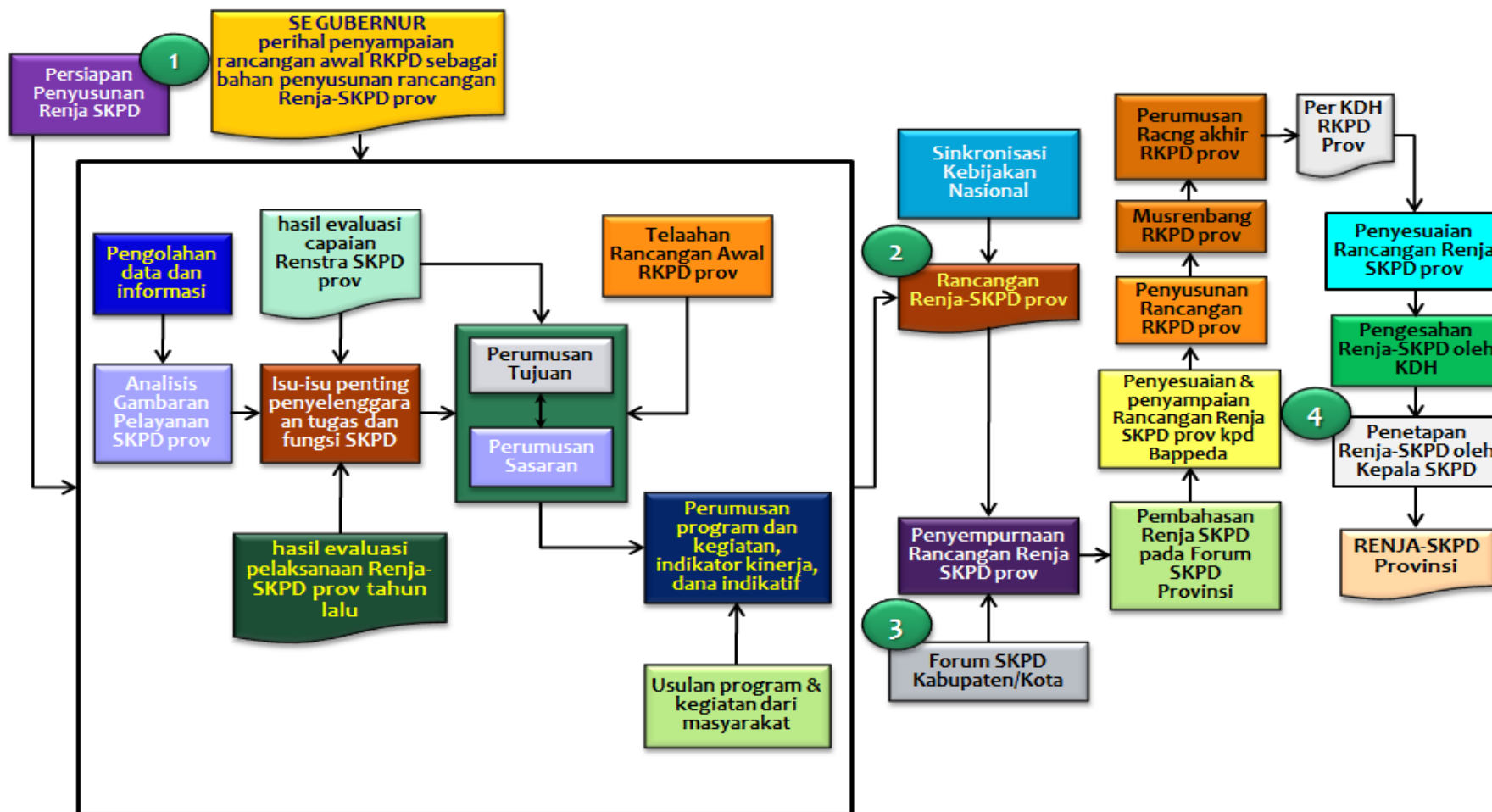
Dengan demikian, maka sebagai langkah awal proses perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Banten dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Provinsi Banten Tahun 2021 dimana setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RPJMD Provinsi dan berpedoman pada Renstra-OPD.

Adapun keterkaitan antar dokumen dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan antar dokumen dalam sistem perencanaan pembangunan nasional

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten dalam hal ini sebagai satuan kerja Pemerintah Propinsi serta sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan. Maka kegiatan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Bidang bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan Provinsi Banten merupakan wujud dari tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.



Gambar 1.2 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Provinsi

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendencygunaan Aparatur Negara ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah ;
44. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
45. Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Banten;
46. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten;
47. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2021 yakni tersedianya suatu dokumen rancangan awal perencanaan program, kegiatan dan anggaran untuk tahun 2021 yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dengan demikian dokumen Renja dimaksud dapat dijadikan rancangan awal acuan dan pegangan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten dan seluruh jajarannya selama periode tahun 2021 dalam melaksanakan pembangunan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman secara efektif dan efisien.

Kegiatan Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2021 mencakup kegiatan koordinasi dan konsultasi pembangunan bidang urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang melibatkan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Terencananya program pembangunan sarana dan prasarana dasar OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten secara terpadu dan sinergis, guna mencapai sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten. Dengan demikian program-program prioritas itu akan terlaksana secara koordinatif dan kooperatif.
2. Tersusunnya Rancangan Program/ Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyajian dan garis besar isi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2021.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD

Memuat rangkaian Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2020 dan perkiraan capaian Tahun 2021 yang mengacu pada APBD Tahun 2021 yang sudah disyahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, kemudian digambarkan Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun-tahun sebelumnya hingga akhirnya dapat disusun Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD dan Review terhadap RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2021 yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Selanjutnya disusun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2021.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dengan disertai rencana pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2021.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan Catatan penting yang perlu



mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2021.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2020 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.

Pencapaian kinerja sasaran, merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, yang tertuang dalam sasaran setiap misi. Visi Disperkim Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yaitu:

" BERSATU MEWUJUDKAN RAKYAT BANTEN SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAKWA"

Pernyataan visi tersebut memiliki makna sebagai berikut :

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan

Berdasarkan rumusan visi pembangunan Banten, diturunkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan, yaitu¹⁵ sebagai berikut:

1. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai serta jaminan pengaliran 24 (dua puluh empat) jam per hari;
2. Pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
3. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
4. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur PU dan permukiman yang andal tersebut berbasis penataan ruang; dan

5. Kondisi dan kualitas pelayanan tersebut dibarengi dengan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman yang semakin luas, merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kehidupan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang mencerminkan keadaan masyarakat yang semakin sejahtera.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yang masih mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2017 – 2022, yaitu :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua
2. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Hubungan Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.1 Hubungan Keterkaitan antara Visi, Msi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022

VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH			
MISI I : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur, serta mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan
MISI II : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air	1) Membangun infrastruktur dasar permukiman di Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis,	1) Pembangunan infrastruktur dasar permukiman di Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis,

antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana	Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Kawasan Perbatasan dan Kawasan Rawan Bencana;	Kawasan Perbatasan dan Kawasan Rawan Bencana;
		2) Membangun Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) regional;	2) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3;
		3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan yang sehat;	3) Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat
		4) Membangun TPST Regional	4) Pembangunan TPST Regional pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3
	Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas.	Meningkatkan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Gedung dan Kawasan Strategis Provinsi pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3	Peningkatan pengelolaan dan pembangunan sarana prasarana gedung dan kawasan strategis provinsi pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Disperkim sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada pencapaian indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018, RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada **Tabel II.1**.

Tabel 2.2 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2019 Terhadap Target RPJMD Tahun 2017 – 2022

TUJUAN/INDIKATOR KINERJA PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KONDISI AWAL 2017	2018		2019			2020		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD										
1.1	Program Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan::%)	2.80	2.80	2.69	3.00	2.69	89.67	100	100	100
		Capaian kesesuaian dengan parameter perilaku, dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	100
		Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan : %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	100
		Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	100
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	100
1.1.1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien (satuan : dokumen)		20.00	20.00	17.00	17.00	100.00	3	3	100
		Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) yang Akuntabel, Efektif, dan efisien (satuan : dokumen)		20.00	20.00	2.00	2.00	100.00	8	8	100
		Tersusunnya Dokumen Laporan Pajak yang Akuntabel, Efektif, dan efisien (satuan : dokumen)		20.00	20.00	3.00	3.00	100.00	2	2	100
1.1.2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien (satuan : Laporan)		20.00	20.00	9.00	9.00	100.00	3	3	100

[illegible]

2.1	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman (Satuan: Ha)		33.33	33.33	33.33	33.33	100	33.33	33.33	100
		Persentase Rumah Layak Huni (Satuan: %)	82.86	84.02	309.50	85.18	93.13	109.33			
		Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak bagi korban bencana dan relokasi korban provinsi (Satuan: %)							100	100	100
		Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan : Ha)	375.29	114.60	58.22	203.20	200.87	98.85	274,6	256,41	93,38
2.1.1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provisni Banten yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan (Satuan : Ha)		114.60	58.22	203.20	200.87	98.85	39,59	0	0
2.1.2	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	Terlaksananya Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Permukiman yang sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku (satuan : dokumen)		33.00	33.00	13.00	23.00	176.92	6	6	100
		Tersusunnya Dokumen Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman yang sesuai Dengan Ketetntuan Yang Berlaku (satuan : dokumen)		0.00	0.00	12.00	27.00	225.00	20	20	100
2.1.3	Penatagunaan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penatagunaan Kawasan Permukiman yang Tepat Guna (Satuan : Kegiatan)		20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	1	1	100
2.1.4	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Terlaksananya Pembangunan Perumahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (Satuan : unit)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	40	100
		Terlaksananya Pembangunan/ Peningkatan PSU Permukiman yang sesuai dengan dokumen perencanaan (Satuan : Unit)		0.00	0.00	103.00	146.00	141.75	137	137	100
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang sesuai dengan dokumen perencanaan (satuan : Unit)		400.00	400.00	100.00	184.00	184.00	506	506	100
2.1.5.	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis Perumahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Satuan : Dok dan Laporan)		53.00	53.00	20.00	13.00	65.00	5	5	100
		Tersusunnya Dokumen Pengawasan Teknis Perumahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Satuan : Dok dan Laporan)		0.00	0.00	17.00	114.00	670.59	54	54	100
2.1.6	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Penatagunaan Pengembangan Perumahan yang tepat guna (Satuan : Kegiatan)		20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	1	1	100

2.1.7	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	Pengadaan Lahan Hunian Tetap 8.861 M2 (Pembayaran Lahan Hunian Tetap) (Satuan : M2)				8.861	8.861	100.00	8.861	8.861	100
2.2	Program Keciaptakaryaan	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (satuan : %)	71.05	72.75	141.53	76.15	96.76	127.07			
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum							81,24	71.10	87.52
		Cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota (satuan : %)	67.94	72.86	97.57	75.57	105.48	139.58			
		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (satuan : %)							5.00	1.00	20
		Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (satuan : %)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan (Satuan : ltr/dtk)		14.01	14.01	43.00	40.07	92.54	20.00	10.00	5.00
		Terlaksananya pembangunan instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota yang sesuai dengan dokumen perencanaan (Satuan : ltr/dtk)		0.00	0.00	0.59	0.59	100.00	137,99	137,99	100
		Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (Satuan : ltr/dtk)		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	18,32	18,32	100
2.2.2	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	Terlaksananya Penyediaan IPALD yang sesuai dengan dokumen perencanaan (Satuan : KK)		0.00	0.00	2300	2300	100.00	238	238	100
2.2.3	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan (Satuan : M2)		0.00	0.00	13.500	13.500	100.00	20.060	20.060	100
2.2.4	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	Terlaksananya Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang sesuai dengan dokumen perencanaan (Satuan : Jiwa)		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0	0	100
		Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Persampahan di Kawasan Strategis yang sesuai dengan dokumen perencanaan (Satuan : Jiwa)		60.000	60.000	71.330	71.330	100.00	0	0	100
2.2.5	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis Infrastruktur Keciaptakaryaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Satuan : dokumen)		21.00	21.00	29.00	29.00	100.00	51	51	100

		Tersusunnya Dokuen Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCiptakaryaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Satuan :dokumen)		20.00	20.00	46.00	46.00	100.00	47	47	100
3	Meningkatnya Sarana dan prasarana gedung startegis Provinsi yang berkualitas										
3.1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persenatse pengelolaan gedung startegis Provinsi	0.00	28.00	99.21	69.00	62.56	90.67	83.00	0.00	89.00
		Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	0.00	25.00	0.00	50.00	39.89	79.78	75.00	69.91	93.21
3.1.1	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi yang sesuai denga Dokumen Perencanaan (Satuan : Gedung)		0.00	0.00	7	5	71.43	1	1	100
3.1.2	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Startegis Provinsi yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan (Satuan : Kawasan)		4.00	4.00	3	3	100.00	1	1	100
3.1.3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Satuan : Kegiatan)		0.00	0.00	20	20	100	1	1	100
3.1.4	Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	Terlaksananya Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan		0.00	0.00	20	20	100	1	1	100



Dilihat dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja program pada tahun 2020 dan 2019 dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Faktor pendorong keberhasilan, antara lain :

- 1. Komitmen serta keterlibatan pimpinan dalam setiap kegiatan;
- 2. Terlaksananya seluruh target program kegiatan maupun subkegiatan.

Dari sisi keuangan, alokasi APBD Murni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 17.560.000.000,00
- Belanja Langsung sebesar Rp 794.438.887.000,00.
- Total Belanja daerah sebesar Rp 776.878.887.000,00 dengan Persentase Belanja Tidak Langsung sebesar 2.21% dari total anggaran, sedangkan Belanja Langsung hanya 97.79% dari anggaran

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tahun 2020, berdasarkan tabel capaian kinerja sasaran dibawah ini :

Tabel 2.3 Capaian Indikator Sasaran

Sasaran Strategis		Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Uraian Faktor Pencapaian/ Ketidaktercapaian / Pelampauan Capaian
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) OPD (Satuan : Nilai)	80.00		0.00%	
		Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani (Satuan : Hektar)	274.60	256.41	93.38%	Belum tercapai target, adanya pengurangan target karena refocusing anggaran
	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman yang Layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan serta Pengelolaan Sampah Regional		Persentase Rumah Layak Huni (Satuan : %)	86.34	73.51	85.14%	Belum tercapai target, data berdasarkan capaian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Desember Tahun 2019
		Program Keciaptakaryaan	Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah (Satuan : %)	20.00	5.00	25.00%	Belum tercapai target, tahun 2020 baru dalam tahap Kajain TPA Regional
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Strategis Provinsi yang berkualitas	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi (Satuan : %)	75.00	69.91	93.21%	Belum tercapai target, pekerjaan pembangunan stadion di kawasan sport centre (Multiyears) mencapai 32,50% dari target induknya selama 2 tahun



Berdasarkan tabel 3.6 di atas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sepanjang Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 90%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu indikator Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi.

Hal ini terjadi karena kegiatan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Startegis Provinsi adanya pekerjaan Pembangunan Sport Centre (multiyear) dengan anggaran sebesar Rp. 420.600.000.000,- pada tahun 2020 tidak mencapai target kinerja tahunan karena waktu yang tidak cukup. Sisa anggaran sebesar Rp. 57.097.615.915,00 diluncurkan bulan Februari 2021.

Selain itu, dari sisi penggunaan anggaran terdapat dua indikator yang tidak menunjukkan efisiensi anggaran, yaitu ; indikator Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi. Indikator tersebut secara capaian kinerja telah melampaui target namun dari sisi alokasi anggaran yang disediakan seluruhnya direalisasikan. Artinya pada pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut tidak ada anggaran yang tidak terserap, dimana pada indikator Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) OPD realisasi anggaran sebesar 77,54% yaitu dari alokasi anggaran Rp. 13.176.343.700,- direalisasikan sebesar Rp. 10.216.300.545 ,- dan pada indikator Persentase Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan dikawasan Strategis Provinsi realisasi anggaran sebesar 86,99% yaitu dari alokasi anggaran Rp. 440.075.058.510,- direalisasikan sebesar Rp. 382.832.377.031,-.

Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran terdapat satu indikator yang dianggap kurang optimal yaitu pada kegiatan yang mendukung pencapaian yaitu indikator Cakupan Penyediaan Pengelolaan Sampah, dimana dari pencapaian kinerja tidak memenuhi target yaitu hanya 25,00% sedangkan dari sisi penyerapan anggaran mencapai 98,83% yaitu telah menyerap anggaran sebesar Rp.566.197.000,- yang dialokasikan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan di Program Keciaptakaryaan. Hal tersebut dikarenakan adanya pengurangan anggaran (Refocusing anggaran) dan pekerjaan yang dilaksanakan yaitu Kajian TPA Regional.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli konsultan sesuai kebutuhan pekerjaan, tenaga jasa pendamping (Tenaga Teknis) pemberi masukan untuk melaksanakan kegiatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terdapat 4 program dan 22 kegiatan Belanja Langsung serta 1 kegiatan Belanja Tidak Langsung yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020. Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

I. Program Tata Kelola Pemerintahan

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kelambagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntable, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dengan sasaran meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Terdapat 6 kegiatan pada program ini dan realisasi pelaksanaan kegiatan pada program ini dapat dilihat ada table 2.12 sebagai berikut:



Tabel 2.4
Realisasi Program Tata Kelola Pemerintahan

No.	Program dan Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN		13.176.343.700,00		10.216.300.545,00	77,54	2.960.043.155,00	22,46
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		350.000.000,00	100,00	264.735.000,00	75,64	85.265.000,00	24,36
	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	8 Dok	321.410.000,00	100,00	243.845.000,00	75,87	77.565.000,00	24,13
	2 Penyusunan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 Dok	19.910.000,00	100,00	12.210.000,00	61,33	7.700.000,00	38,67
	3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 Dok	8.680.000,00	100,00	8.680.000,00	100,00	0,00	0,00
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		1.100.000.000,00	100,00	984.935.000,00	89,54	115.065.000,00	10,46
	1 Penyusunan laporan Evaluasi Program dan kegiatan	3 Dok	65.165.000,00	100,00	65.165.000,00	100,00	0,00	0,00
	2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	3 Dok	485.955.000,00	100,00	417.988.500,00	86,01	67.966.500,00	13,99
	3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	3 Dok	89.109.000,00	100,00	88.465.000,00	99,28	644.000,00	0,72
	4 Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	108.346.000,00	100,00	93.441.500,00	86,24	14.904.500,00	13,76
	5 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	4 dok	351.425.000,00	100,00	319.875.000,00	91,02	31.550.000,00	8,98
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur		350.000.000,00	100,00	336.750.000,00	96,21	13.250.000,00	3,79
	1 Fasilitasi Administarsi Kepegawaian	1 Keg	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	1 Keg	250.000.000,00	100,00	236.750.000,00	94,70	13.250.000,00	5,30
4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		250.000.000,00	100,00	247.954.000,00	99,18	2.046.000,00	0,82
	1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD	1 2 Bln	166.550.000,00	100,00	165.150.000,00	99,16	1.400.000,00	0,84
	2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	1 2 Bln	83.450.000,00	100,00	82.804.000,00	99,23	646.000,00	0,77
5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran		9.946.343.700,00	97,23	7.507.644.240,00	75,48	2.438.699.460,00	24,52
	1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1 Keg	6.877.913.700,00	100,00	5.898.058.397,00	85,75	979.855.303,00	14,25
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Keg	886.500.000,00	68,87	390.053.375,00	44,00	496.446.625,00	56,00
	3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Keg	1.854.760.000,00	100,00	1.125.711.408,00	60,69	729.048.592,00	39,31
	4 Koordinasi an Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	1 Keg	327.170.000,00	100,00	93.821.060,00	28,68	233.348.940,00	71,32



6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis		1.180.000.000,00	100,00	874.282.305,00	74,09	305.717.695,00	25,91
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1 Keg	1.180.000.000,00	100,00	874.282.305,00	74,09	305.717.695,00	25,91

Realisasi fisik program ini 97,91% dengan penyerapan keuangan Rp. 10.216.300.545,00 (77,54%). Detail kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka terwujudnya opini audit BPK dengan target WTP tahun 2020. Uraian indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut tabel 2.13 :

Tabel 2.5

Realisasi Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		350.000.000,00	100,00	264.735.000,00	75,64	85.265.000,00	24,36
1	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	8 Dok	321.410.000,00	100,00	243.845.000,00	75,87	77.565.000,00	24,13
2	Penyusunan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 Dok	19.910.000,00	100,00	12.210.000,00	61,33	7.700.000,00	38,67
3	Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 Dok	8.680.000,00	100,00	8.680.000,00	100,00	0,00	0,00

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh juta rupiah). Terdapat 3 tolok ukur dengan realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % untuk semua tolok ukur dan *realisasi keuangan* sebesar Rp264.735.000,00 (75.64%). Sisa anggaran sebesar Rp. 85.265.000,00 merupakan Efisiensi Belanja cetak

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Uang Saku, Belanja Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Pendampingan, Belanja Dokumentasi.

2. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan daerah dengan target kinerja 100% pada tahun 2020.

Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 2.14 sebagai berikut :



Tabel 2.6

Realisasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		1.100.000.000,00	100,00	984.935.000,00	89,54	115.065.000,00	10,46
1	Penyusunan laporan Evaluasi Program dan kegiatan	3 Dok	65.165.000,00	100,00	65.165.000,00	100,00	0,00	0,00
2	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	3 Dok	485.955.000,00	100,00	417.988.500,00	86,01	67.966.500,00	13,99
3	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	3 Dok	89.109.000,00	100,00	88.465.000,00	99,28	644.000,00	0,72
4	Monitoring dan Evaluasi	1 Dok	108.346.000,00	100,00	93.441.500,00	86,24	14.904.500,00	13,76
5	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	4 dok	351.425.000,00	100,00	319.875.000,00	91,02	31.550.000,00	8,98

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar *Rp. 1.100.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)* realisasi *progres fisik adalah sebesar 100%* untuk semua tolok ukur dan *realisasi keuangan sebesar Rp. 984.935.000,00 (89,54%)*. Sisa anggaran sebesar *Rp. 115.065.000,00* merupakan efisiensi belanja bakanan dan binuman kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja perjalanan dinas luas daerah, belanja uang saku, belanja jasa narasumber/instruktur, belanja tenaga ahli dan sisa kontrak konsultan manajemen dan belanja konsultan perencanaan.

3. Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya penyediaan barang jasa, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran dengan target 100 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan ini dapat di lihat pada tabel 2.15 sebagai berikut :

Tabel 2.7

Realisasi Kegiatan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran		9.946.343.700,00	97,23	7.507.644.240,00	75,48	2.438.699.460,00	24,52
1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1 Keg	6.877.913.700,00	100,00	5.898.058.397,00	85,75	979.855.303,00	14,25
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Keg	886.500.000,00	68,87	390.053.375,00	44,00	496.446.625,00	56,00
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Keg	1.854.760.000,00	100,00	1.125.711.408,00	60,69	729.048.592,00	39,31



	4	Koordinasi an Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	1	Keg	327.170.000,00	100,00	93.821.060,00	28,68	233.348.940,00	71,32
--	---	--	---	-----	----------------	--------	---------------	-------	----------------	-------

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar *Rp. 9.946.343.700,00 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah)*, sampai dengan Desember 2020 realisasi *progres fisik adalah sebesar 97.23 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.507.644.240,00 (75,48 %)*. Sisa anggaran sebesar *Rp. 2.438.699.460,00 (24,52 %)* merupakan efesiensi Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Alat Listrik dan elektronik (Lampu Pijar, batter Kering), Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Non Kendaraan Bermotor, Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Kendaraan Bermotor, dikarenakan harga satuan BBM kenaikannya tidak signifikan, Belanja Relepon/Faksimil/Internet, Belanja Jasa Kebersihan, Belanja Jasa TV Cable, Belanja Premi Asuransi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS, Belanja Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Uang Saku, Belanja Uang Makan Tambahan (Extra Fooding), Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Pendampingan, Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas, Belanja Jasa Operator/Administrasi/ Teknis, Belanja Promosi dan Publikasi. Sementara terdapat anggaran yang tidak digunakan diantaranya :

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat ukur lainnya, hammer Test Digital sebanyak 2 buah (Rp. 126.000.000,00) dikarenakan sudah tidak tersedia dalam e-Katalog pada saat pelaksanaan, dan waktunya tidak mencukupi dengan pengadaan manual
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat pembersih yaitu Hand Washer Unit sebanyak 20 Unit (Rp. 5.000.000,00) dikarenakan kebutuhannya sudah tercukupi
 - 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan alat pembersih Sanitizer Chamber tidak dibelanjakan 2 unit (Rp. 19.000.000,00) dari 2 unit, dikarenakan kebutuhannya sudah tercukupi
 - 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan peralatan kebersihan mesin potong rumput seharga sebanyak 10 unit (Rp. 40.000.000,00) dikarenakan kebutuhannya sudah tercukupi
 - 5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan peralatan kebersihan Chan Saw Besar sebanyak 5 unit (Rp. 40.000.000,00) dikarenakan kebutuhannya sudah tercukupi
 - 6) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan peralatan personil komputer Scanner A3 sebanyak 3 Unit (Rp. 150.000.000,00) dikarenakan sudah tidak tersedia dalam e-Katalog pada saat pelaksanaan, dan waktunya tidak mencukupi dengan pengadaan manual
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur dengan target 100 % tahun 2020. Uraian indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 2.15 sebagai berikut :

Tabel 2.8

Realisasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur		350.000.000,00	100,00	336.750.000,00	96,21	13.250.000,00	3,79
1	Fasilitasi Administarsi Kepegawaian	1 Keg	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	100,00	0,00	0,00
2	Peningkatan Kompetensi Aparatur	1 Keg	250.000.000,00	100,00	236.750.000,00	94,70	13.250.000,00	5,30

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 350.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah*). Terdapat 2 sub kegiatan dengan realisasi *progres fisik adalah sebesar 100 %* untuk semua tolok ukur dan *realisasi keuangan sebesar Rp. 336.750.000,00 (96,21 %)*. Sisa anggaran sebesar Rp. 13.250.000,00 (3.79%) merupakan Efisiensi belanja jasa narasumber/instruktur dan belanja jasa tenaga ahli.

5. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan dengan target 100 % tahun 2020. Uraian indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 2.16 sebagai berikut :

Tabel 2.9

Realisasi Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		250.000.000,00	100,00	247.954.000,00	99,18	2.046.000,00	0,82
1	Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD	12 Bln	166.550.000,00	100,00	165.150.000,00	99,16	1.400.000,00	0,84
2	Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	12 Bln	83.450.000,00	100,00	82.804.000,00	99,23	646.000,00	0,77

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*). Terdapat 2 sub kegiatan dengan realisasi *progres fisik adalah sebesar 100 %* dan *realisasi keuangan sebesar Rp. 247.954.000,00 (99.18%)*. Sisa anggaran sebesar Rp. 2.046.000,00 (0,82%) merupakan efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja jasa tenaga ahli.

6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis



Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan dengan target 100 % tahun 2020. Uraian indikator kinerja, target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 2.17 sebagai berikut :

Tabel 2.10

Realisasi Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis		1.180.000.000,00	100,00	874.282.305,00	74,09	305.717.695,00	25,91
1	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1 Keg	1.180.000.000,00	100,00	874.282.305,00	74,09	305.717.695,00	25,91

II. Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di Kawasan kumuh, Kawasan perbatasan dan Kawasan rawan bencana dengan sasaran tersedianya perumahan dan permukiman yang layak. Terdapat 7 kegiatan pada program ini dan realisasi pelaksanaan kegiatan pada program ini dapat dilihat ada table 2.18 sebagai berikut :

Tabel 2.11

Realisasi Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN		98.165.080.880,00		96.705.796.743,00	98,51	1.459.284.137,00	1,49
7	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		31.358.587.813,00	100,00	31.057.313.192,00	99,04	301.274.621,00	0,96
1	1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Banten	39,59 Ha	31.358.587.813,00	100,00	31.057.313.192,00	99,04	301.274.621,00	0,96
8	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman		3.305.876.500,00	100,00	3.210.649.040,00	97,12	95.227.460,00	2,88
1	1 Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	6 Dok	887.365.000,00	100,00	848.594.890,00	95,63	38.770.110,00	4,37
2	2 Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	20 Dok	2.418.511.500,00	100,00	2.362.054.150,00	97,67	56.457.350,00	2,33
9	Penatagunaan Kawasan Permukiman		477.946.300,00	100,00	426.146.300,00	89,16	51.800.000,00	10,84
1	1 Penatagunaan Kawasan Permukiman	1 Keg	477.946.300,00	100,00	426.146.300,00	89,16	51.800.000,00	10,84
10	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan		54.335.015.000,00	100,00	53.471.946.844,00	98,41	863.068.156,00	1,59
1	1 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	506 Unit	25.530.405.000,00	100,00	24.996.638.376,00	97,91	533.766.624,00	2,09
2	2 Penyediaan/rehabilitasi rumah untuk relokasi program provinsi dan korban bencana	40 Unit	2.210.250.000,00	100,00	2.200.862.468,00	99,58	9.387.532,00	0,42
3	3 Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman	137 Unit	26.594.360.000,00	100,00	26.274.446.000,00	98,80	319.914.000,00	1,20



11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan			6.469.922.000,00	100,00	6.414.816.100,00	99,15	55.105.900,00	0,85
	1 Perencanaan Teknis Perumahan	5	Dok	935.175.000,00	100,00	929.846.200,00	99,43	5.328.800,00	0,57
	2 Pengawasan Teknis Perumahan	54	Dok	5.534.747.000,00	100,00	5.484.969.900,00	99,10	49.777.100,00	0,90
12	Penatagunaan Pengembangan Perumahan			910.304.800,00	100,00	867.224.800,00	95,27	43.080.000,00	4,73
	1 Penatagunaan Pengembangan Perumahan	1	Keg	910.304.800,00	100,00	867.224.800,00	95,27	43.080.000,00	4,73
13	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan			1.307.428.467,00	100,00	1.257.700.467,00	96,20	49.728.000,00	3,80
	1 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	8.861	M2	1.307.428.467,00	100,00	1.257.700.467,00	96,20	49.728.000,00	3,80

Realisasi fisik program ini 100,00 % dengan penyerapan keuangan Rp. 96.705.796.743,00 (98,51 %).
Detail kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

7. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran luasan Kawasan kumuh yang ditata (203.20 ha) dengan target 39,59 Ha pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 2.12** sebagai berikut :

Tabel 2.12

Realisasi Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman		3.305.876.500,00	100,00	3.210.649.040,00	97,12	95.227.460,00	2,88
	1 Perencanaan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	6 Dok	887.365.000,00	100,00	848.594.890,00	95,63	38.770.110,00	4,37
	2 Pengawasan Teknis Bidang Kawasan Permukiman	20 Dok	2.418.511.500,00	100,00	2.362.054.150,00	97,67	56.457.350,00	2,33

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.305.876.500,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). Realisasi progres fisik adalah sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.210.649.040,00 (97,12%). Sisa anggaran Rp. 95.227.460,00 (2,88 %) merupakan efesiensi belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan sisa kontrak 24 paket pekerjaan.

8. Penatagunaan Kawasan Permukiman.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran luasan Kawasan kumuh yang ditata (203.20 ha) dengan target 39,59 Ha pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 2.20** sebagai berikut :

Tabel 2.13

Realisasi Kegiatan Penatagunaan Kawasan Permukiman

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Penatagunaan Kawasan Permukiman		477.946.300,00	100,00	426.146.300,00	89.16	103.600.000,00	21.68
1	Penatagunaan Kawasan Permukiman	1 Keg	477.946.300,00	100,00	426.146.300,00	89.16	103.600.000,00	21.68

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 477.946.300,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah*). Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % untuk semua tolok ukur dan realisasi keuangan sebesar Rp. 426.146.300,00 (89.16%). Sisa anggaran sebesar Rp. 51.800.000,00 (10.84%) merupakan efisiensi belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman kegiatan dan belanja perjalanan dinas dalam daerah.

9. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran luasan Kawasan kumuh yang ditata (203.20 ha) dengan target 39,59 Ha pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 2.14** sebagai berikut :

Tabel 2.14

Realisasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

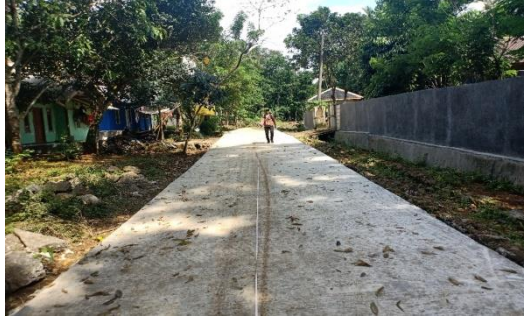
No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh		31.358.587.813,00	100,00	31.057.313.192,00	99,04	301.274.621,00	0,96
1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Banten	39,59 Ha	31.358.587.813,00	100,00	31.057.313.192,00	99,04	301.274.621,00	0,96

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 31.358.587.813,00 (*Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*). Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100,00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.057.313.192,00 (99,04 %). Sisa anggaran sebesar Rp. 301.274.621,00 (0,96%) merupakan Sisa Kontrak 146 paket.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh ini dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini :

	
DESA LEBAK. KEC. MUNJUL, KAB. PANDEGLANG	
	
DESA PASIREURIH, KEC. CISATA, KAB. PANDEGLANG	
	
DESA GUNUNG SARI, KEC. MAUK, KAB. TANGERANG	
	
RW 21 KEL. SERUA, KEC. CIPUTAT, KOTA TANGERANG SELATAN	

PAKET LELANG



Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang



Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang



Desa Rancaseneng Kec.Cikeusik Kab.Pandeglang



Desa Rancaseneng Kec.Cikeusik Kab.Pandeglang

10. Penyediaan Pembangunan Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran persentase rumah tidak layak huni yang ditangani (85.18 %) dengan target 85,18 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 2.15** sebagai berikut :

Tabel 2.15

Realisasi Kegiatan Penyediaan dan Pembangunan Perumahan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan		54.335.015.000,00	100,00	53.471.946.844,00	98,41	863.068.156,00	1,59
1	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	506 Unit	25.530.405.000,00	100,00	24.996.638.376,00	97,91	533.766.624,00	2,09
2	Penyediaan/rehabilitasi rumah untuk relokasi program provinsi dan korban bencana	40 Unit	2.210.250.000,00	100,00	2.200.862.468,00	99,58	9.387.532,00	0,42
3	Pembangunan/Peningkatan PSU Permukiman	137 Unit	26.594.360.000,00	100,00	26.274.446.000,00	98,80	319.914.000,00	1,20

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar *Rp. 54.335.015.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Belas Ribu Rupiah)*. Realisasi *progres fisik* adalah sebesar *100,00 %* dan *realisasi keuangan* sebesar *Rp. 53.471.946.844,00 (98.41%)*. Sisa anggaran sebesar *Rp. 863.068.156,00 (1,59 %)* merupakan efisiensi Belanja Bahan Baku Bangunan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan dinas Dalam Daerah, Uang Saku, Belanja Promosi dan Publikasi, Belanja Lain-Lain Pengadaan Barang/Jasa dan sisa kontrak 139 paket pekerjaan.





PENERIMA : SAPLAN, ALAMAT : KP.CITAMAN LBR ANYAR RT.005 RW.011, DESA PADARINCANG



PENERIMA : SAPARUDIN, ALAMAT : KP.CITAMAN MASJID RT.004 RW.002, DESA PADARINCANG



PENERIMA : ALI FIKRI, ALAMAT : KP.MANGGU RT.014 RW 007, DESA PADARINCANG

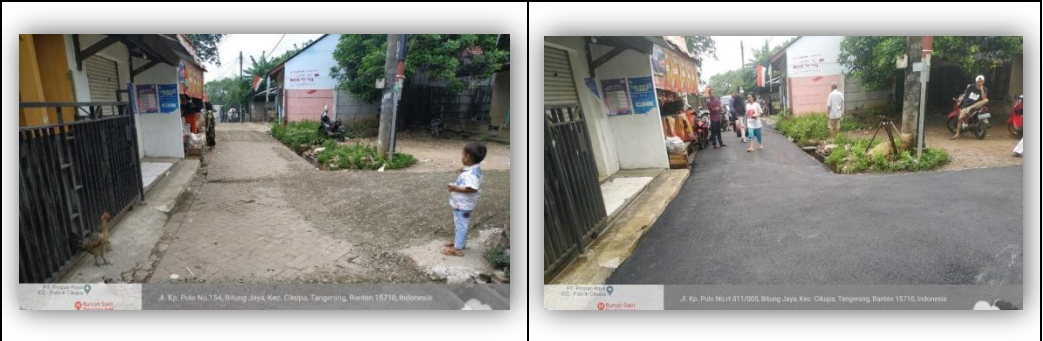


PENERIMA : KOSIM, ALAMAT : DESA PASIR EURIH, KEC. CISATA, KAB. PANDEGLANG



PENERIMA : JUNAEDI, ALAMAT : DESA MEDALSARI, KEC. SAKETI, KAB. PANDEGLANG

	
PENERIMA : AAH, ALAMAT : DESA CIBARANI, KEC. CISATA, KAB. PANDEGLANG	
	
PENERIMA : HENI NUARAENI, ALAMAT : DESA BANJARSARI, KEC. WARUNG GUNUNG, KAB. LEBAK	
	
PENERIMA : ROHIMI, ALAMAT : DESA BANJARSARI, KEC. WARUNG GUNUNG, KAB. LEBAK	
	
PENERIMA : UNASIH, ALAMAT : DESA BANJARSARI, KEC. WARUNG GUNUNG, KAB. LEBAK	
	
PENERIMA : ONAH, ALAMAT : DESA CURUG PANJANG, KEC. CIKULUR, KAB. LEBAK	



RW. 05, KAMPUNG PULO, DESA BITUNG JAYA, KEC. CIKUPA, KAB. PANDEGLANG



KP. SABRANG CIBADAK RW 04 DESA PASIR GADUNG KEC. CIKUPA, KAB. TANGERANG



RW. 06 DESA PASIR GADUNG KEC. CIKUPA KAB. TANGERANG



KP. PENGKOLAN RT 04 RW 01, DESA PASIR GADUNG, KAB. TANGERANG



KP. KADU KAUNG DESA MANDALASRI KEC. SAKETI KAB. PANDEGLANG



11. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran persentase rumah tidak layak huni yang ditangani dengan target 100,00 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 2.16** sebagai berikut :

Tabel 2.16

Realisasi Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan		6.469.922.000,00	100,00	6.414.816.100,00	99,15	55.105.900,00	0,85
	1 Perencanaan Teknis Perumahan	5 Dok	935.175.000,00	100,00	929.846.200,00	99,43	5.328.800,00	0,57
	2 Pengawasan Teknis Perumahan	54 Dok	5.534.747.000,00	100,00	5.484.969.900,00	99,10	49.777.100,00	0,90

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.469.922.000,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*). Realisasi progres fisik adalah sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.414.816.100,00 (99,15 %). Sisa anggaran sebesar Rp. 55.105.900,00 (0,85 %) merupakan efisiensi Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi dan sisa kontrak belanja konsultasi pengawasan sebanyak 54 paket pekerjaan dan perencanaan.

12. Penatagunaan Pengembangan Perumahan

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran persentase rumah tidak layak huni yang ditangani (84,02%) dengan target 84,02 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 2.17** sebagai berikut :

Tabel 2.17

Realisasi Kegiatan Penatagunaan Pengembangan Perumahan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Penatagunaan Pengembangan Perumahan		910.304.800,00	100,00	867.224.800,00	95,27	43.080.000,00	4,73
	1 Penatagunaan Pengembangan Perumahan	1 Keg	910.304.800,00	100,00	867.224.800,00	95,27	43.080.000,00	4,73

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 910.304.800,00 (*Sembilan Ratus Sepuluh Juta tiga ratus Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*). Realisasi progres fisik adalah



sebesar 100,00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 867.224.800,00 (95,27%). Sisa anggaran sebesar Rp. 43.080.000,00 (4,73%) merupakan efisiensi belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja jasa narasumber/instruktur, belanja jasa tenaga ahli.

13. Penyelenggaraan Pengadaan Lahan.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran persentase rumah tidak layak huni yang ditangani (84,02 %) dengan target 84,02 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 2.18** sebagai berikut :

Tabel 2.18

Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan		1.307.428.467,00	100,00	1.257.700.467,00	96,20	49.728.000,00	3,80
1	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	8.861 M2	1.307.428.467,00	100,00	1.257.700.467,00	96,20	49.728.000,00	3,80

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.307.428.467,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Empat ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.257.700.467,00 (96,20%). Sisa anggaran sebesar Rp. 49.728.000,00 (3,80%) merupakan efisiensi belanja makanan dna minuman kegiatan, belanja perjalanan dinas dalam daerah, belanja jasa narasumber/instruktur, belanja jasa tenaga ahli, belanja jasa pendampingan, belanja modal tanah-pengadaan bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.

III. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Program ini dilaksanakan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang terpadu dan berlekanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di Kawasan perbatasan dan Kawasan strategis dengan sasaran tercapainya sarana dan prasarana gedung strategis provinsi yang berkualitas. Terdapat 4 kegiatan pada program ini dan realisasi pelaksanaan kegiatan pada program ini dapat dilihat ada table 2.19 sebagai berikut :

Tabel 2.19

Realisasi Program Penataan Banguann dan Lingkungan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN		478.633.935.933,00		417.468.106.136,00	87,22	61.165.829.797,00	12,78



14	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi		13.993.218.801,00	100,00	13.811.613.427,00	98,70	181.605.374,00	1,30
	1 Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	1 Ged	13.993.218.801,00	100,00	13.811.613.427,00	98,70	181.605.374,00	1,30
15	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi		440.075.058.510,00	87,02	382.832.377.031,00	86,99	57.242.681.479,00	13,01
	1 Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	1 Kaw	440.075.058.510,00	87,02	382.832.377.031,00	86,99	57.242.681.479,00	13,01
16	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis		24.210.108.622,00	100,00	20.482.634.478,00	84,60	3.727.474.144,00	15,40
	1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung KP3B	1 Keg	24.210.108.622,00	100,00	20.482.634.478,00	84,60	3.727.474.144,00	15,40
17	Penataan Sarana dan Prasarana KP3B		355.550.000,00	100,00	341.481.200,00	96,04	14.068.800,00	3,96
	1 Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung KP3B	1 Keg	355.550.000,00	100,00	341.481.200,00	96,04	14.068.800,00	3,96

Realisasi fisik program ini 87,22 % dengan penyerapan keuangan Rp. 417.468.106.136,00 (87,22%). Detail kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

14. Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tercapainya sarana dan prasarana gedung strategis provinsi yang berkualitas dengan indikator sasaran persentase pengelolaan gedung strategis provinsi dengan target 28 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 2.20** sebagai berikut :

Tabel 2.20

Realisasi Kegiatan Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11): (6)	(Rp.) (6)- (11)	(%) (13): (6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi		13.993.218.801,00	100,00	13.811.613.427,00	98,70	181.605.374,00	1,30
	1 Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	1 Ged	13.993.218.801,00	100,00	13.811.613.427,00	98,70	181.605.374,00	1,30

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.993.218.801,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah). Realisasi progres fisik adalah sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.811.613.427,00 (98,70%). Sisa anggaran sebesar Rp. 181.605.374,00 (1,30%) merupakan efisiensi belanja jasa listrik, belanja perjalanan dinas dalam daerah, uang saku, belanja jasa tenaga kerja lapangan, belanja lain-lain pengadaan barang/jasa dan sisa kontrak.



15. Penataan Sarana dan Prasarana KP3B

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tercapainya sarana dan prasarana gedung strategis provinsi yang berkualitas dengan indikator sasaran persentase Penataan Sarana dan Prasarana KP3B dengan target 25 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 2.21** sebagai berikut :

Tabel 2.21

Realisasi Kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana KP3B

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Penataan Sarana dan Prasarana KP3B		355,550,000.00	100.00	341,481,200.00	96.04	14,068,800.00	3.96
1	Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung KP3B	1 Keg	355,550,000.00	100.00	341,481,200.00	96.04	14,068,800.00	3.96

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 355.550.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % dan *realisasi keuangan* sebesar Rp. 341.481.200,00 (94,04%). Sisa anggaran sebesar Rp. 14.068.800,00 (3,96%) merupakan efisiensi belanja listrik, belanja penggandaan, belanja perjalanan dinas dalam daerah dan sisa kontrak belanja modal fedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat kerja.

16. Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tercapainya sarana dan prasarana gedung strategis provinsi yang berkualitas dengan indikator sasaran persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan di Kawasan strategis provinsi dengan target 25 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 2.22** sebagai berikut :

Tabel 2.22

Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Provinsi

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6)-(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi		440,075,058,510.00	87.02	382,832,377,031.00	86.99	57,242,681,479.00	13.01
1	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	1 Kaw	440,075,058,510.00	87.02	382,832,377,031.00	86.99	57,242,681,479.00	13.01



Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 440.075.058.510,00 (Empat ratus Empat Puluh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah). Realisasi progres fisik adalah sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 382.832.377.031,00 (86,99%). Sisa anggaran sebesar Rp. 57.24.681.479,00 (13,01%) merupakan efisiensi Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Lain-Lain Pengadaan Barang/Jasa dan Sisa Kontrak belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat olah raga serta sisa kontrak PL sebanyak 104 paket pekerjaan.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi ini dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini :

		
DINAS BKD	DINAS PMD	DINAS KOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN
		
B3	DINAS DP3AKB	DINAS KOPERASI DAN UMKM

17. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tercapainya sarana dan prasarana gedung strategis provinsi yang berkualitas dengan indikator sasaran persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis dengan target 25 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada **tabel 2.23** sebagai berikut :

Tabel 2.23

Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				Fisik (%)	Keuangan (Rp.)	(%) (11):(6)	(Rp.) (6):(11)	(%) (13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis		24.210.108.622,00	100,00	20.482.634.478,00	84,60	3.727.474.144,00	15,40



	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung KP3B	1	Keg	24.210.108.622,00	100,00	20.482.634.478,00	84,60	3.727.474.144,00	15,40
--	---	--	---	-----	-------------------	--------	-------------------	-------	------------------	-------

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar *Rp. 24.210.108.622,00 (Dua Puluh Empat milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Seratus Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)*. Realisasi *progres fisik* adalah sebesar 100 % dan *realisasi keuangan* sebesar *Rp. 20.482.634.478,00 (84,60%)*. Sisa anggaran sebesar *Rp. 3.727.474.144,00 (15,40%)* merupakan efisiensi Belanja Air, Belanja Listrik, Belanja Premi Asuransi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Non PNS, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanj Jasa Service, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB, Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja, Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota, Belanja Pemeliharaan Jalan, Uang saku dan Uang Makan, Uang Makan Tambahan (Extra Fooding), Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas, Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan.

IV. Program Keciptakaryaan

Program ini dilaksanakan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang terpadu dan berlekanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di Kawasan perbatasan dan Kawasan strategis dengan sasaran tersedianya perumahan dan permukiman yang layak. Terdapat 5 kegiatan pada program ini dan realisasi pelaksanaan kegiatan pada program ini dapat dilihat ada table 2.24 sebagai berikut :

Tabel 2.24
Realisasi Program Keciptakaryaan

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11): (6)	(6)-(11)	(13): (6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	PROGRAM KECIPTAKARYAAN		68,002,568,000.00		62,469,290,248.00	91.86	5,533,277,752.00	8.14
1	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih		14,573,767,000.00	100.00	14,121,871,000.00	96.90	451,896,000.00	3.10
	1 Pembangunan Instalasi Pengolahan Aair Lintas Kabupaten/Kota	137.99 It.dt	9,509,751,000.00	100.00	9,292,341,000.00	97.71	217,410,000.00	2.29
	2 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	18.32 It.dt	4,464,016,000.00	100.00	4,275,271,000.00	95.77	188,745,000.00	4.23
	3 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	3 It.dt	600,000,000.00	100.00	554,259,000.00	0.00	45,741,000.00	7.62
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi		6,591,392,000.00	100.00	6,486,467,434.00	98.41	104,924,566.00	1.59
	1 Penyediaan IPALD	238 KK	6,591,392,000.00	100.00	6,486,467,434.00	98.41	104,924,566.00	1.59
3	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan		35,199,260,000.00	100.00	34,811,895,303.00	98.90	387,364,697.00	1.10
	1 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakryaan	20,060 M2	35,199,260,000.00	100.00	34,811,895,303.00	98.90	387,364,697.00	1.10



4	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan			572,889,000.00	100.00	566,197,000.00	98.83	6,692,000.00	1.17
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	0	Jiwa	565,389,000.00	100.00	558,697,000.00	98.82	6,692,000.00	1.18
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	0	Jiwa	7,500,000.00	100.00	7,500,000.00	0.00	0.00	
5	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman			11,065,260,000.00	100.00	6,482,859,511.00	58.59	4,582,400,489.00	41.41
1	Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya	4	Dok	814,390,500.00	100.00	792,858,250.00	97.36	21,532,250.00	2.64
2	Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya	47	Dok	10,250,869,500.00	100.00	5,690,001,261.00	55.51	4,560,868,239.00	44.49

Realisasi fisik program ini 100,00% dengan penyerapan keuangan Rp. 62,469,290,248,00 (91,68 %). Detail kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

18. Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih.

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran cakupan rumah tangga yang memiliki akses air bersih dengan target 76,15 % pada tahun 2019. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada tabel 2.32 sebagai berikut :

Tabel 2.25
Realisasi Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih		14,573,767,000.00	100.00	14,121,871,000.00	96.90	451,896,000.00	3.10
1	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota	137.99 lt.dt	9,509,751,000.00	100.00	9,292,341,000.00	97.71	217,410,000.00	2.29
2	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	18.32 lt.dt	4,464,016,000.00	100.00	4,275,271,000.00	95.77	188,745,000.00	4.23
3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	3 lt.dt	600,000,000.00	100.00	554,259,000.00	0.00	45,741,000.00	7.62

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 14.573.767.000,00 (*Empat Belas Milyar Lima ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) dan Realisasi sebesar Rp. 14.121.871.000,00 (*Empat Belas Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*). Sisa anggaran sebesar Rp. 451.896.000,00 (3,10%) merupakan efisiensi Belanja Sewa Meja Kursi, Belanja Sewa Tenda, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Promosi dan Publikasi dan sisa kontrak belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebanyak 26 paket pekerjaan dan Sisa kontrak pekerjaan Pembangunan Bronchaptering, Reservoir dan Perpipaan Desa Sukamanah Kec. Menes Kab. Pandeglang.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih ini dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini :



PEMBANGUNAN WTP SINDANG HEULA

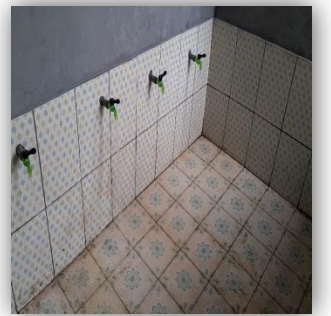
Dokumentasi hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sumur Dalam dan Bangunan Pelengkapnnya SPN Mandalawangi

		
PENGEBORAN	PEKERJAAN GALIAN DAN PEMASANGAN PIPA 2'	PEKERJAAN JALUR PIPA
		
PEKERJAAN TANGGA KONTROL AIR	PEKERJAAN DUDUKAN TORN DAN TORN AIR	MESIN POMPA
		
BOX PANEL DAN DUDUKANNYA	BOX PANEL	BOX PANEL DAN DUDUKANNYA
		
PEKERJAAN TANGGA KONTROL AIR	MESIN POMPA	PEK. DUDUKAN TORN DAN TORN AIR
PEMBANGUNAN SUMUR DALAM DAN BANGUNAN PELENGKAPANNYA SPN MANDALAWANGI		

Dokumentasi hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Brochaptering, Reresvoir dan Perpipaan

	
	
	
	
PEMBANGUNAN BROANCHAPTERING, RESERVOIR DAN PERPIPAAN	

Dokumentasi hasil pelaksanaan pekerjaan Air Bersih

		
DESA PASIR PETEY KECAMATAN CADASARI KABUPATEN PANDEGLANG		
		
DESA KRESEK KECAMATAN KRESEK KABUPATEN TANGERANG		
		
KAWASAN ASRAMA YONIF 320 DESA CADASARI KECAMATAN CADASARI KABUPATEN PANDEGLANG		
		
KP. CIPAIT BARAT DESA CIOMAS KEC. PADARINCANG KAB. SERANG		

19. Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi .

Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi dengan target 72,86 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada tabel 2.26 sebagai berikut :

Tabel 2.26

Realisasi Kegiatan Pengelolan dan Pengembangan Sanitasi

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi		6,591,392,000.00	100.00	6,486,467,434.00	98.41	104,924,566.00	1.59
1	Penyediaan IPALD	238 KK	6,591,392,000.00	100.00	6,486,467,434.00	98.41	104,924,566.00	1.59

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar *Rp. 6.591.392.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)*. Realisasi *progres fisik* adalah sebesar *100.00%* dan *realisasi keuangan* sebesar *Rp. 6.486.467.434,00 (98,41%)*. Sisa anggaran sebesar *Rp. 104.924.566,00 (1,59%)* merupakan efisiensi Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Meja Kursi, Belanja Sewa Tenda, Belanja makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Promosi dan Publikasi dan sisa kontrak belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebanyak 27 paket pekerjaan .

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi ini dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini :



KP. CIBOBOS DESA KARANGKA MULYAN KECAMATAN CIHARA
KABUPATEN LEBAK



DESA CIUYAH KECAMATAN SAJIRA KABUPATEN LEBAK



KP. CICALYUR SANGKO DESA SAWARNA KECAMATAN BAYAH KAB. LEBAK	
	
KP. CIKAUNG DESA SAWARNA KECAMATAN BAYAH KABUPATEN LEBAK	

Dokumentasi hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan IPAL Komunal Kawasan Banten Lama, Kel. Banten, Kec. Kasemen, Kota Serang

	
	
	
	
PEMBANGUNAN IPAL KOMUNAL KAWASAN BANTEN LAMA, KEL. BANTEN, KEC. KASEMEN, KOTA SERANG	



20. Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan .
- Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional dengan target 0 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada tabel 2.27 sebagai berikut :

Tabel 2.27

Realisasi Kegiatan Pengelolan dan Pengembangan Persampahan

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11): (6)	(6)-(11)	(13): (6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan		572,889,000.00	100.00	566,197,000.00	98.83	6,692,000.00	1.17
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	0 Jiwa	565,389,000.00	100.00	558,697,000.00	98.82	6,692,000.00	1.18
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	0 Jiwa	7,500,000.00	100.00	7,500,000.00	0.00	0.00	

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 572.889.000,00 (Lima ratus tujuh Puluh Dua Juta Delapan ratus delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Realisasi progres fisik adalah sebesar 100,00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 566.197.000,00,00 (98,83%).

Sisa anggaran sebesar Rp. 6.692.000,00 (1,17%) merupakan efisiensi Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan dan sisa kontrak belanja jasa konsultan penelitian.

Target kinerja pada kegiatan Pengelolan dan Pengembangan Persampahan berkurang dikarenakan adanya refocusing anggaran.

21. Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan.
- Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional dengan target 0 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada tabel 2.28 sebagai berikut :

Tabel 2.28

Realisasi Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11): (6)	(6)-(11)	(13): (6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan		35,199,260,000.00	100.00	34,811,895,303.00	98.90	387,364,697.00	1.10
1	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	20,060 M2	35,199,260,000.00	100.00	34,811,895,303.00	98.90	387,364,697.00	1.10



Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 35.199.260.000,00 (Tiga Puluh lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua ratus enam Puluh Ribu Rupiah). Realisasi progres fisik adalah sebesar 100,00% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.811.895.303,00 (98,90%). Sisa anggaran sebesar Rp. 387.364.697,00 (1,10%) merupakan Sisa pembayaran lahan dan sisa kontrak.

22. Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman.
- Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan sasaran program tersedianya perumahan dan permukiman yang layak dengan indikator sasaran cakupan pelayanan pengelolaan sampah regional dengan target 0 % pada tahun 2020. Uraian tabel indikator, tolok ukur dan target kinerja dapat di lihat pada tabel 2.29 sebagai berikut:

Tabel 2.29
Realisasi Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis
Bidang Infrastruktur Permukiman

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Realiasi			Sisa Anggaran	
				(%)	(Rp.)	(11):(6)	(6)-(11)	(13):(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman		11,065,260,000.00	100.00	6,482,859,511.00	58.59	4,582,400,489.00	41.41
1	Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya	4 Dok	814,390,500.00	100.00	792,858,250.00	97.36	21,532,250.00	2.64
2	Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya	47 Dok	10,250,869,500.00	100.00	5,690,001,261.00	55.51	4,560,868,239.00	44.49

Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 11.065.260.000,00 (Sebelas Milyar Enam puluh Lima Juta Dua ratus enam Puluh Ribu Rupiah). Realisasi progres fisik adalah sebesar 100,00 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.482.859.511,00 (58,59%). Sisa anggaran sebesar Rp. 4.582.400.489,00 (41,41%) merupakan efisiensi Belanja Penggandaan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Adendum penyesuaian harga, paket pekerjaan Pengawasan Pembangunan Landscape Kawasan OPD. Pekerjaan fisiknya tahun jamak (Multi Years Contract). Sementara terdapat anggaran yang tidak digunakan dikarenakan adanya overlapping paket pekerjaan, yaitu:

1. Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis di Kec. Binuang, Kec. Ciruas dan Kec. Pontang Kabupaten Serang;
2. Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis di Kec. Kresek Kabupaten Tangerang.



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2021

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2021 ada beberapa kegiatan yang harus mendapatkan prioritas terutama pada pengawasan, antara lain :

- a. Pengawasan terhadap proyek strategis nasional maupun daerah;
- b. Penanganan dalam pengaduan masyarakat;

Meningkatkan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) kepada para ASN dan penyuluh anti korupsi di daerah



Renja Dinas PerkimTahun 2021

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2017-2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019					Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2020		
	Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Renstra Tahun 2019		Realisasi Renja Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2020		Realisasi Renja Tahun 2020 (DPA Murni)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Renja Tahun 2020 (DPA Refocusing)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (DPA Refocusing)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan		Jumlah	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.	100%	13	Dokumen	22	Dokumen	169,23%	13	Dokumen	13	Dokumen	100%	13	Dokumen	100%	35	Dokumen	135%
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.	100%	28	Dokumen	18	Dokumen	64,28%	34	Dokumen	34	Dokumen	97%	33	Dokumen	97%	51	Dokumen	82%
Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Tersedianya Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.	100%						4	Kegiatan	4	Kegiatan	100%	4	Kegiatan	100%	4	Kegiatan	100%
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	12	Bulan	12	Bulan	100%									12	Bulan	100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	12	Bulan	12	Bulan	100%									12	Bulan	100%
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Terselenggaranya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	100%	12	Bulan	12	Bulan	100%									12	Bulan	100%
Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.	100%	3	Kegiatan	3	Kegiatan	100%	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1	Kegiatan	100%	4	Kegiatan	100%
Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	100%	12	Bulan	12	Bulan	100%									12	Bulan	100%
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.	100%	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	100%	24	Bulan	100%
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B	Terselenggaranya Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT Pengelolaan KP3B	100%														0	%	
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	Terselenggaranya Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	100%	6	Dokumen	8	Dokumen	133,33%									8	Dokumen	133%



Renja Dinas Perkim Tahun 2021

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis yang Akuntabel, Efektif, dan efisien.	100%						1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1	Kegiatan	100%	1	Kegiatan	100%
Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	403,76	93,01	Ha	42,94	Ha	46,17%	71,26	Ha	98,33	Ha	137,98%	98,33	Ha	137,98%	141,27	Ha	86%
Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	100%	27	Dokumen	25	Dokumen	92,59%	26	Dokumen	54	Dokumen	207,69%	11	Dokumen	42,30%	36	Dokumen	68%
Penatagunaan Kawasan Permukiman	Terselenggaranya Penatagunaan Kawasan Permukiman	100%	1	Kegiatan	20	%	20%	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1	Kegiatan	100%	21	Kegiatan	1050%
Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	Terselenggaranya Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	100%	523	Unit	208	Unit	239,77%	770	Unit	431	Unit	55,97%	431	Unit	55,97%	639	Unit	49%
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	100%	8	Dokumen	37	Dokumen	462,50%	15	Dokumen	37	Dokumen	246,67%	5	Dokumen	33,30%	42	Dokumen	183%
Penatagunaan Pengembangan Perumahan	Terselenggaranya Penatagunaan Pengembangan Perumahan	100%	1	Kegiatan	20	%	20%	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1	Kegiatan	100%	21	Kegiatan	1050%
Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	100%	49.000	m2	49.000	m2	100%	50.000	m2	15.000	m2	30%	0	m2	0%	49000	m2	49%
Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	100%	74,43	ltr/det	43,89	ltr/det	58,97%	38,47	ltr/det	163,99	ltr/det	426,04%	139	ltr/det	361,32%	182,89	ltr/det	162%
Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	100%	19.100	KK	2.300	KK	12,04%			500	KK		100	KK		2400	KK	13%



Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakarya	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakarya	100%	17.300	m2	14.300	m2	82,66%	14.000	m2	19.989	m2	142,78%	0	m2	0,00%	14300	m2	46%
Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	100%	71.330	Jiwa	71.330	Jiwa	100%	488.420	Jiwa	1.250	Jiwa	0,26%	0	Jiwa	0,00%	71330	Jiwa	13%
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	Terselenggaranya Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	100%	8	Dokumen	75	Dokumen	937,50%	16	Dokumen	71	Dokumen	443,75%	13	Dokumen	81,25%	88	Dokumen	367%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B	100%	0	Kegiatan												0	Kegiatan	
Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	Terselenggaranya Penataan Sarana dan Prasarana KP3B	100%	100	Kegiatan	20	%	20%											
Pengelolaan gedung strategis Provinsi	Terselenggaranya Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	100%	8	Gedung	7	Gedung	87,50%	2	Gedung	1	Gedung	50%	1	Gedung	50%	8	Gedung	80%
Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	Terselenggaranya Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	100%	5	Kawasan	3	Kawasan	60%	4	Kawasan	6	Kawasan	150%	6	Kawasan	150%	9	Kawasan	100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	100%						2	Kegiatan	1	Kegiatan	50%	1	Kegiatan	50%	1	Kegiatan	50%
Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	Terlaksananya Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis yang tepat guna.	100%						1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%	1	Kegiatan	100%	1	Kegiatan	100%

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja

Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 bidang perumahan dan cipta karya sebagian besar terkendala waktu pelaksanaan pekerjaan yang salah satunya disebabkan oleh permasalahan pelelangan seperti batal lelang dan gagal lelang. Selain itu, disebabkan pula, permasalahan lahan hingga adanya pekerjaan yang melewati Tahun anggaran 2020.

Solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir sisa anggaran untuk periode ke depan adalah dengan melakukan pelelangan dini dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Lebih matang dalam hal perencanaan (kesiapan lokasi, DED, penetapan HPS)
- Persiapan anomali cuaca hujan ekstrim di beberapa lokasi pekerjaan;
- Melakukan Kajian mendalam peraturan yang terkait dengan pekerjaan;
- Penyelesaian pembangunan agar dapat segera berfungsi (rounding up);
- Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dengan Kab/ kota dan unit satker lainnya;
- Perancangan distribusi pegawai seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran dan beban kerja;
- Memperhatikan paket pekerjaan dengan anggaraan besar dan paket pekerjaan kecil tetapi menyebar di banyak lokasi;

2.1.2 Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2020

Secara garis besar perkiraan realisasi capaian target Renstra sampai dengan Tahun 2020 dapat dikatakan baik (asumsi program kegiatan Tahun 2020 dapat dilaksanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Akan tetapi, pada Tahun 2020 mengalami refocusing pagu APBD dikarenakan faktor perubahan anggaran yang disebabkan oleh pandemik covid – 19. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan tidak

dapat dilaksanakan yang menyebabkan target program dan kegiatan Renja Tahun 2020 tidak bisa terpenuhi 100%. Refocusing dilakukan sebanyak 3 kali. Pada refocusing tahap 1 perubahan anggaran hanya terdapat pada belanja langsung, dan menyebabkan pagu anggaran berubah menjadi Rp. 770.674.915.000,-. Refocusing tahap 2 juga hanya terdapat pada belanja langsung dan berubah menjadi Rp. 141.000.000.000,-. Sedangkan pada refocusing tahap 3 terdapat pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dan menyebabkan pagu anggaran berubah menjadi Rp. 140.295.806.000,-.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berkaitan dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum khususnya mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memiliki indikator SPM dalam bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

a. Jenis pelayanan dasar dan indikator dari SPM bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi meliputi:

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, dengan ketentuan:
 - Pada saat masa pasca bencana;
 - Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
 - Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota.



- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi, dengan ketentuan:
 - Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - Pengurangan kawasan kumuh 10 -15 Ha; dan/atau
 - Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

b. Batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025.

Adapun target SPM pada Tahun 2025 merupakan target dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat untuk Provinsi. Untuk pelaksanaan di Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

Langkah yang diambil dalam rangka mendukung target SPM ini adalah dengan melaksanakan program kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu.

Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2010, berupa pembangunan Jalan Lingkungan Paving blok dan drainase, Rehab Rumah, Pembuatan MCK di 8 Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten. Tahun 2017, direncanakan akan dilaksanakan peningkatan rumah tidak layak huni sebesar 97 unit dan akan direalisasikan sebesar 89 unit.

2. Pembinaan dan Penataan Perumahan

Merupakan langkah pembinaan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 tentang Standar pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahan kabupaten/ kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang

perumahan rakyat untuk rumah layak huni melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan;

- b. Melakukan pemutahiran data rumah secara berkala dari kabupaten/kota;
- c. Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk ketersediaan rumah layak huni kepada Menteri.

Peraturan terbaru juga mengenai pedoman SPM merujuk kepada Peraturan Menteri PUPR No.29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana,

- a. Dalam pasal 5, Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota.
- b. Dalam pasal 6, disebutkan bahwa Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota dan kebutuhan pokok air minum sehari – hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

• Status Pencapaian SPM Bidang Perumahan

1. Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

Rumus cara perhitungan capaian SPM adalah:

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

Keterangan:

- Pembilang
Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n.
- Penyebut

Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n.

- Ukuran/Konstanta Persentase (%)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Tingkat kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berada dalam posisi cukup baik, mengingat progres realisasi menunjukkan prosentase yang cukup baik.

Hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terletak kegiatan-kegiatan penyediaan prasarana dasar masyarakat, khususnya untuk penyediaan air bersih, serta kegiatan selain itu pada pemenuhan target nasional pada target SPM dan Target SDG's yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten/ kota, tentunya saja ketersediaan anggaran menjadi point yang sangat penting yang dapat mewujudkan target-target tersebut.

Sinergitas dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan antara SKPD provinsi dengan SKPD kabupaten/kota serta dengan Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat dalam mencapai tujuan pembangunan sudah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, berupa pelaksanaan program RPIJM pada bidang keciptakaryaan.

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pemenuhan infrastruktur bidang pemukiman di Provinsi Banten, adalah :

1. Masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi, baik di perkotaan maupun di pedesaan.
2. Lemahnya dukungan pembiayaan pembangunan sektor perumahan & permukiman dari sisi pemerintah akibat adanya skala prioritas

sektor pembangunan lain dan keterbatasan pendapatan pemerintah sehingga penanganan pembangunan perumahan permukiman dalam penyediaan prasarana dasar, pengaturan lahan dalam skala besar serta rehabilitasi kawasan kumuh menjadi sulit direalisasikan.

3. Disisi lain pendanaannya melalui sumber pembiayaan komersial (swasta) hanya dapat melayani kebutuhan non MBR (golongan masyarakat menengah keatas), sedangkan untuk MBR perlu dibiayai oleh pemerintah.
4. Terdapat potensi sumber pembiayaan lain yang bukan dari anggaran pemerintah yang dapat dimobilisasi untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman seperti penggunaan dana pensiun, asuransi dll yang dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan jangka panjang untuk mengatasi kelangkaan dana namun memerlukan upaya melalui pengaturan dan kebijakan.

Terkait permasalahan dan hambatan yang dihadapi, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat, pemerintah kab/ kota dan SKPD lain terkait program kegiatan yang dilaksanakan. Koordinasi ini dapat dilakukan dengan cara:

- Melakukan rapat koordinasi rutin mengenai pelaksanaan kegiatan yang melibatkan kabupaten/ kota maupun SKPD lain;
- Mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Kabupaten/ kota terkait mengenai rencana pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan agar tidak tumpang tindih.
- Mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Pusat mengenai dukungan infrastruktur berupa bantuan penganggaran maupun penanganan program kegiatan terkait kewenangan sesuai perundangan.
- Mengirimkan surat kepada SKPD lain yang terkait mengenai permasalahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk ditindaklanjuti (permasalahan alih fungsi lahan/ perubahan tata ruang, penurunan kualitas air permukaan, pengambilan dan perizinan air tanah berlebihan, kerusakan hutan, lahan kritis).



- Permintaan resmi mengenai data dan informasi bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (terutama data SDGs dan SPM Perumahan).
- Membentuk unit pelayanan terpadu.
- **Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);**

Dampaknya permasalahan-permasalahan ini dapat dijabarkan melalui Misi terkait dengan Pelaksanaan Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu pada Misi Pertama dan Misi Kelima sebagai berikut:

1. *Misi Terkait (Misi Pertama),*

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Mendukung Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang Berwawasan Lingkungan, yang memiliki sasaran program:

- Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman

Adapun faktor penghambat dan pendorong dari sasaran ini dibagi ke dalam Infrastruktur Permukiman sebagai berikut:

Infrastruktur Permukiman

- ❖ Faktor Penghambat Infrastruktur Permukiman
 - Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah
 - Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam
 - Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi
 - Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan relatif tinggi akibat krisis finansial lokal dan global.
 - Desentralisasi
 - Persebaran penduduk di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di wilayah Tangerang

- Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru akan membahayakan daya dukung kota, terutama di kota-kota besar.
- Kerusakan lingkungan hidup
 - Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan.
- Daya saing kota dan demokratisasi
 - Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaing dengan kota-kota di dalam negeri semata.
 - Bentuk persaingan pun bergeser dari *comparative advantages* menuju ke era *competitive advantages*.
- Perubahan Iklim dan bencana alam
 - Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air laut menimbulkan bahaya banjir.
 - Posisi Indonesia yang berada di kawasan *ring of fire* memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.
- ❖ Faktor pendorong pembangunan Infrastruktur Pemukiman
- Perlunya menetapkan target-target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan di kota metropolitan/besar yang sampai saat ini masih belum menuai hasil yang optimal. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang masih belum memadai.
- Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota.
- Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.



- Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
- Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
- Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
- Memenuhi backlog perumahan sebesar 6 juta unit sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru, rata-rata sekitar 820.000 unit rumah setiap tahunnya.
- Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.
- Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (*green building*) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
- Mendukung program pengembangan kawasan agropolitan.
- Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.

2. Misi Terkait (Misi Kelima),

Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih, yang memiliki sasaran program:

- Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi;
- Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;
- Meningkatnya pelayanan data dan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;

Adapun faktor penghambat dan pendorong dari sasaran misi ke-lima terfokus pada kesekretariatan dan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebagai berikut:

Sekretariat

- ❖ Faktor penghambat pada **Sekretariat**
 - Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan/pengguna.
 - Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan.
 - Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang.
 - Dibutuhkan langkah-langkah reformasi birokrasi yang strategis, konkret dan terintegrasi.
 - Diperlukan koordinasi internal yang kuat: antarfungsi manajemen, antarsub-bidang serta memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.
 - Pengelolaan: Masih sangat birokratik belum inovatif (ala korporasi), masih bersifat manajemen proyek belum manajemen

aset, masih terkesan hanya mengelola supply belum mengelola demand.

- Data aset infrastruktur nasional (pusat dan daerah) tidak lengkap.
- Diperlukan reformasi peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi.
- Diperlukan penyusunan produk-produk kajian untuk pimpinan yang sifatnya *early warning*/pemecahan masalah yang mendesak dan produk-produk yang sifatnya permintaan.

Kelembagaan dan SDM

- ❖ Faktor penghambat aspek kelembagaan dan SDM
 - Praktik penyelenggaraan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten ke depan tidak lagi diwarnai oleh sistem yang birokratis, kurang fleksibel, dengan kapasitas inovasi dan kreativitas yang masih terbatas.
 - Kegiatan pengelolaan infrastruktur masih terkonsentrasi pada aspek pembangunan, belum memperhatikan aspek pemanfaatan dan pengembangan aset.
 - Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ke depan akan semakin penting dalam menentukan keberlangsungan pengelolaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur di daerah.
 - Kapasitas institusi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten memiliki keterbatasan, seperti ukuran organisasi yang dirasakan masih terlalu gemuk dan struktur yang belum sepenuhnya efektif.
 - Kualitas dan produktivitas SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten saat ini belum cukup memadai, padahal secara kuantitas SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten telah melampaui kebutuhan saat ini.

- ❖ Faktor pendorong pembangunan aspek kelembagaan dan SDM
 - Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dan permukiman di berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.
 - Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) *strategic goals* Sumber Daya Air, yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.
 - Peningkatan koordinasi penyelenggaraan infrastuktur Sumber Daya Air antar tingkatan pemerintahan dan antarpelaku pembangunan.
 - Penyelenggaraan *good governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.

- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten antara lain:

1. Peningkatan jumlah penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus beresiko terhadap kelangsungan sumber daya air.
2. Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim global
3. Pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs)
4. Pengembangan manajemen SDM termasuk kelembagaan dan teknologi bidang SDA
5. Desentralisasi dan otonomi daerah
6. Potensi pencemaran air cenderung semakin meningkat akibat limbah rumah tangga, pertanian dan industri



7. Pertumbuhan dan perkembangan lahan permukiman sebagai suatu keniscayaan akibat penambahan penduduk.
8. Konversi lahan, perubahan pemanfaatan lahan, dan perkembangan lahan terbangun harus diantisipasi pengaruhnya terhadap keseimbangan tata ruang air.

▪ **Formulasi isu-isu penting**

Khusus untuk Tahun 2021, Isu Strategis Provinsi Banten antara lain sebagai berikut :

1. Kesenjangan Wilayah
2. Daya Saing Daerah
3. Kemiskinan dan pengangguran
4. Tata Kelola Pemerintahan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2021 terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Banten	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100,00	Program Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Banten	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	100,00	
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Banten	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100,00	Program Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Banten	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	100,00	
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Banten	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100,00	Program Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Banten	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100,00	
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Banten	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100,00	Program Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Banten	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100,00	
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Provinsi Banten	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	333,30	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Provinsi Banten	Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	274,60	
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Provinsi Banten	Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman (Satuan: %)	33,33	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Provinsi Banten	Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman (Satuan: %)	33,33	
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Provinsi Banten	Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi (Satuan: %)	100,00	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Provinsi Banten	Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi (Satuan: %)	86,34	



	Program Keciaptakaryaan	Provinsi Banten	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum (Satuan: %)	88,04	Program Keciaptakaryaan	Provinsi Banten	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum (Satuan: %)	88,04	
	Program Keciaptakaryaan	Provinsi Banten	Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (Satuan: %)	20,00	Program Keciaptakaryaan	Provinsi Banten	Cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (Satuan: %)	20,00	
	Program Keciaptakaryaan	Provinsi Banten	Cakupan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab/Kota (Satuan: %)	15,00	Program Keciaptakaryaan	Provinsi Banten	Cakupan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab/Kota (Satuan: %)	15,00	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Provinsi Banten	Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	89,00	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Provinsi Banten	Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	89,00	
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Provinsi Banten	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	88.00	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Provinsi Banten	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	88.00	

Tabel 2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 202



Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan telaahan sebagai berikut:

- Luas Kawasan Kumuh yang ditata
Target RKPD sebesar 333,30 Ha penanganan, sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar 274,60 Ha. Hal ini terjadi karena setelah dianalisa terdapat prioritas penanganan yang dilaksanakan.
- Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi (%)
Target RKPD sebesar 100 % penanganan, sedangkan hasil analisis kebutuhan sebesar 86,34 %. Hal ini terjadi karena setelah dianalisa terdapat prioritas penanganan yang dilaksanakan.
- Indikator kinerja yang lainnya Target RKPD masih sama dengan Hasil Analisis Kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program kegiatan Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten berasal dari usulan sewaktu Forum SKPD Tahun 2020 maupun usulan langsung melalui surat permohonan

URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET	KEGIATAN	OUTPUT TARGET	PAGU KEGIATAN	ΧΑΤΑΤΑΝ ΣΕΡΙΦΙΚΑΣΙ (ΔΑΡΙ ΗΑΣΙΑ ΦΟΡΥΜ ΟΠΙΔ)
2	3	4	5	6	7	
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					630,000,000,000	Pagu Indikatif Renstra/RPJMD pada tahun ke 4 adalah Rp. 611.793.150.000, dari hasil forum OPD terdapat selisih anggaran Rp.3.116.828.370.800
	1 Program Tata Kelola Pemerintahan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman				12,825,610,000	
		Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %) 100	1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		300,000,000	
				1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 8 Dokumen	270,535,000	
				2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP) Dokumen	20,785,000	
				3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 Dokumen	8,680,000	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET	KEGIATAN	OUTPUT TARGET	PAGU KEGIATAN RKPD	ΧΑΤΑΤΑΝ ΣΕΡΙΦΙ ΚΑΣΙ (ΔΑΡΙ ΗΑΣΙΛ ΦΟΡΥΜ ΟΠΙΔ)
1	2	3	4	5	6	7	
					2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dokumen 584,497,000	
					3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	12 Dokumen 170,133,000	
					4 Monitoring dan Evaluasi	4 Dokumen 165,888,000	
					5 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	6 Dokumen 214,186,000	
			Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %) 100	3 Peningkatan Kapasitas Aparatur		150,000,000	
					1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	1 Kegiatan 50,000,000	
					2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	1 Kegiatan 100,000,000	
			Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %) 100	4 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		150,000,000	
					1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD	12 Bulan 94,060,000	
					2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	12 Bulan 55,940,000	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET	KEGIATAN	OUTPUT TARGET	PAGU KEGIATAN	KATATAN GEBI ΦΙΚΑΣΙ (ΔΑΡΙ ΗΑΣΙΑ ΦΟΡΥΜ ΟΠΔ)
						RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	
					1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD 12 Bulan	94,060,000	
					2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD 12 Bulan	55,940,000	
			Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %) 100	5 Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran		10,025,610,000	
					1 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1 Kegiatan	4,904,000,000	
					2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan	2,389,500,000	
					3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Kegiatan	2,382,110,000	
					4 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah 1 Kegiatan	350,000,000	
			Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %) 100	6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis		1,000,000,000	
					1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis 1 Kegiatan	1,000,000,000	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET	KEGIATAN	PAGU KEGIATAN		XATATAN ΣΕΡΙΦΙΚΑΣΙ (ΔΑΡΙ ΗΑΣΙΑ ΦΟΡΥΜ ΟΠΔ)
					RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	
			Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha) 333,3 Ha	7 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh		12,794,400,000	
					1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Banten 25,03 Ha	12,794,400,000	
			Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha) 333,3 Ha	8 Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman		2,271,720,000	Trondol dituntaskan termasuk rumah krn alokasi anggaran 2020 hanya 50% dr hasil DED
					1 Perencanaan Teknis bidang kawasan permukiman 15 Dok	1,632,000,000	
					2 Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman 8 Dokumen	639,720,000	
			Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha) 333,3 Ha	9 Penatagunaan Kawasan Permukiman		1,000,000,000	
					1 Penatagunaan Kawasan Permukiman 1 Kegiatan	1,000,000,000	
			Cakupan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Relokasi Korban Provinsi (Satuan: %) 100	10 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan		15,147,000,000	

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET	KEGIATAN	PAGU KEGIATAN			XATATAN ΣΕΡΙ ΦΙΚΑΣΙ (ΔΑΡΙ ΗΑΣΙΑ Φ ΟΡΥΜ ΟΠΔ)	
					RKPD				
1	2	3	4	5	6				7
					2	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	145 Unit	7,395,000,000	
					3	Pembangunan/ Peningkatan PSU Permukiman	1 Unit PSU Masjid	4,590,000,000	
			cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman (Satuan: %) 33.3	11 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan				1,929,000,000	
					1	Perencanaan Teknis Perumahan	6 Dokumen	1,269,000,000	
					2	Pengawasan Teknis Perumahan	1 Dokumen	660,000,000	
			cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman (Satuan: %) 33.3	12 Penatagunaan Pengembangan Perumahan				1,215,000,000	
					1	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	1 Kegiatan	1,215,000,000	
			cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman (Satuan: %) 33.3	13 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan				10,400,000,000	
					1	Pengadaan Lahan	5.000 M2	10,400,000,000	Lahan yang diambil di Kemanisan, kebutuhan 10 M
						Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Usulan di Kota Serang	Usulan Help Desk Forum OPD		

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET	KEGIATAN	PAGU KEGIATAN		KATATAN ΣΕΠΙ ΦΙΚΑΣΙ (ΔΑΡΙ ΗΑΣΙΑ ΦΟΡΥΜ ΟΠΔ)
					RKPD		
1	2	3	4	5	6		7
			persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %) 89	14 Pengelolaan gedung strategis Provinsi		510,000,000	
					1 Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi	1 Gedung	510,000,000
			persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %) 88	15 Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi		471,878,580,000	
					1 Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	4 Kawasan	471,878,580,000
			persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %) 100	16 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis		20,000,000,000	
					1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Strategis	2 Kawasan	20,000,000,000

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET	KEGIATAN	OUTPUT TARGET	PAGU KEGIATAN	KATATAN ΣΕΡΙ ΦΙΚΑΣΙ (ΔΑΡΙ ΗΑΣΙΑ ΦΟΡΥΜ ΟΠΔ)
						RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	
					1 Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis 1 Kegiatan	1,020,000,000	
		4 Program Keciptakaryaan				78,850,590,000	
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum 88 (Satuan: %)	18 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih		33,045,390,000	
					1 Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota 137,99 ltr/ det	30,600,000,000	
					2 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 12 ltr/ det	1,890,000,000	
					3 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan 14 ltr/ det	555,390,000	
			Cakupan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kab/Kota (Satuan: %)	15 19 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi		1,020,000,000	
					1 Penyediaan IPALD 700 KK	1,020,000,000	
			cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (Satuan: %)	20 20 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan		31,200,000,000	
					1 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan 10.000 m2	31,200,000,000	30 M

NO	URUSAN	PROGRAM	OUTCOME TARGET	KEGIATAN	PAGU KEGIATAN		KATATAN ΣΕΠΙ ΦΙΚΑΣΙ (ΔΑΡΙ ΗΑΣΙΑ ΦΟΡΥΜ ΟΠΙΔ)
					OUTPUT TARGET	RKPD	
1	2	3	4	5	6	7	
					1 Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi 477.420 Jiwa		
					2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan 1.250 Jiwa	525,000,000	
			cakupan penyediaan prasarana persampahan Regional (Satuan: %) 20	22 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman		13,060,200,000	
					1 Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya 6 Dokumen	2,093,200,000	
					2 Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karya 1 Dokumen	10,967,000,000	
JUMLAH						630.000.000.000	

Tabel 2.3 Daftar Usulan Kegiatan FOPD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Program Kegiatan Provinsi Banten Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Akses dan kualitas Air Minum dan Sanitasi Layak;
- Melanjutkan dan menyambungkan pembangunan infrastruktur dengan Kawasan Produksi dan Sektor Unggulan;
- Memperkuat Stabilitas dan Mitigasi Bencana (kondisi perlu).

Dan Program Kegiatan Provinsi Banten Tahun 2021 memiliki Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

- Pembangunan Sport Centre (Multiyears) dan Banten Lama;
- Pembangunan Infrastruktur mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah dan Kawasan Strategis Provinsi;
- Penataan Kawasan Kumuh;
- Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)

Tema Pembangunan dan Isu Strategis Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Tema Pembangunan Tahun 2021

Isu strategis Provinsi Banten Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola Pemerintahan
2. Daya saing sumber daya manusia

3. Pembangunan infrastruktur.
4. Transformasi ekonomi.

Disamping itu, terdapat isu strategis dan permasalahan pembangunan banten ditinjau dari sisi:

- a. Kesenjangan wilayah (IPM, Infrastruktur, pendapatan) sebagai berikut:
 1. Ketimpangan Aksesibilitas Kesehatan antara WKP I, II dan III
 2. Ketimpangan Daya Beli Masyarakat antara WKP I, II dan III
 3. Kurangnya Infrastruktur Ekonomi Masyarakat (Sesuai Potensi Ekonomi Wilayah)
 4. Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan antara WKP I, II dan III
 5. Ketimpangan Kemandirian Fiskal Antar Daerah dan Wilayah
 6. Kurangnya Konektivitas Infrastruktur Kewilayahan dan Antar Wilayah
- b. Kesenjangan Daya Saing (SDA dan SDM)
 1. Ketimpangan Pemanfaatan SDA Akibat Lemahnya Kualitas SDM
 2. Ketimpangan Investasi Antar Wilayah
 3. Kurangnya Daya Dukung Infrastruktur dalam Meningkatkan Investasi
- c. Kemiskinan dan Pengangguran
 1. Tingginya Migrasi Penduduk Antar Daerah di Provinsi Banten dan Dari Luar Provinsi Banten
 2. Rendahnya Kepemilikan Aset Dalam Memenuhi Kebutuhan
 3. Masih Tingginya Desa Tertinggal di Wilayah Provinsi Banten
- d. Tata Kelola Pemerintahan
 1. Belum optimalnya Sistem Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
 2. Belum optimalnya Integritas dan Kompetensi Aparatur
 3. Belum Optimalnya Tertib Pengelolaan Anggaran
 4. Belum Optimalnya Konsolidasi Demokrasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dengan memperhatikan amanat RPJPD Provinsi Banten 2005-2025, serta mempertimbangkan aspek potensi/kondisi aktual, dan permasalahan yang dihadapi, maka Pembangunan infrastruktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Provinsi Banten diselenggarakan dengan berpedoman pada Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 adalah:

***“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul
Karimah”***

Sedangkan, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas.
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas.
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Memperhatikan Visi dan misi tersebut dan perubahan paradigma serta kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Banten dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional, maupun global.

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten terkait dengan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 antara lain terkait misi 1 dan misi 2 sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur.

a. *Misi Terkait (Misi Pertama),*

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yang memiliki prioritas unggulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan E-Planning, E-monev, dan E-Budgeting;
- 2) Reformasi Birokrasi;
- 3) Penerapan Manajemen Kinerja (Peningkatan Predikat LAKIP dari CC ke BB);
- 4) Reformasi Tata Kelola Keuangan (Peningkatan predikat dari Disclaimer / WDP ke WTP);
- 5) Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan

Publik;

- 6) Perbaikan Angka Indeks Persepsi Korupsi;
- 7) Perbaikan Hubungan Kerja Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

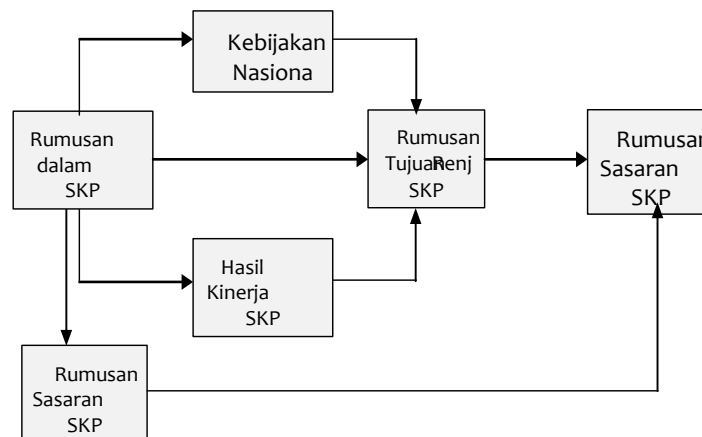
b. *Misi Terkait (Misi Kedua),*

Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, yang memiliki prioritas unggulan bidang perumahan, kawasan permukiman dan Ke-Cipta Karya-an sebagai berikut:

- 1) Revitalisasi Kawasan Banten Lama dalam Rangka Pengembangan Sektor Pariwisata dan Pelestarian Cagar Budaya serta Kearifan Lokal;
- 2) Penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan, Perdesaan/Perkotaan;

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada tahun 2019, dimana infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD PROVINSI



Gambar 3.5 Bagan Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja OPD Provinsi Sebagai penjabaran atas visi yang terkait Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, maka tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur bidang perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan*

pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan iman dan taqwa guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.
2. Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana.

Kemudian agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik, sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten dalam periode 2017-2022 antara lain:

1. Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja;
2. Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang layak;
3. Tercapainya Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas;

3.3 Program dan Kegiatan

Dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran kinerja Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten dan harapan kinerja Tahun 2021 dengan memperhatikan pencapaian misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian Standar pelayanan Minimal (SPM), sehingga prioritas penanganan Tahun 2018 sesuai dengan RKPD, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten melaksanakan program kegiatan dengan gambaran umum sebagai berikut:

- ✦ Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Terdiri dari 4 program dan 22 kegiatan
- ✦ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
Sebagian besar program kegiatan tersebar di seluruh provinsi Banten
- ✦ Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah sebesar **Rp. 630.000.000.000,00** (*Enam Ratus Tiga Puluh Miliar Rupiah*).



Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2021 berdasarkan bidang urusan dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut:

PROGRAM DAN KEGIATAN			RENCANA PAGU ANGGARAN TA. 2021 (Rp)
URUSAN WAJIB			
I Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan			44.915.220.000
	1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	12.794.400.000
	2	Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	2.271.720.000
	3	Penatagunaan Kawasan Permukiman	1.000.000.000
	4	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	2.087.100.000
	5	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	15.147.000.000
	6	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	1.215.000.000
	7	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	10.400.000.000
II	Program Keciaptakaryaan		78.850.590.000
	8	Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih	33.045.390.000
	9	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi	1.020.000.000
	10	Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan	525.000.000
	11	Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	13.060.200.000
	12	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciaptakaryaan	31.200.000.000
III	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		493.408.580.000



	13	Pengelolaan gedung strategis Provinsi	510.000.000
	14	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	471.878.580.000
	15	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	20.000.000.000
	16	Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	1.020.000.000
IV	Program Tata Kelola Pemerintahan		12.825.610.000
	17	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	300.000.000
	18	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1.200.000.000
	19	Penyediaan Barang dan Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	10.025.610.000
	20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1.000.000.000
	21	Peningkatan Kapasitas Aparatur	150.000.000
	22	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	150.000.000
TOTAL ANGGARAN TA 2021			630.000.000.000

Adapun detail rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2021 disajikan dalam lampiran.

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2021 adalah pencapaian target kinerja sesuai rencana, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan. Sedangkan, jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dapat dipilih penanganan sesuai kebutuhan prioritas sesuai arahan dan isu strategis yang harus dilaksanakan.

4.2 Kaidah pelaksanaan

Untuk merealisasikannya memiliki 5 (lima) prinsip utama yaitu :

- a. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif memiliki kekhususan (*Specific*), terukur (*Measurable*), ketercapaian (*Achievable*), ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan waktu (*Time*). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang merujuk pada rencana capaian kinerja berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan, merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas OPD, antar tingkatan pemerintahan dan dunia usaha maupun masyarakat, terdiri atas : peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan kualitas kesehatan; peningkatan daya beli masyarakat; kemandirian pangan; peningkatan kinerja aparatur; pengembangan infrastruktur wilayah; kemandirian energi dan kecukupan air baku; penanganan pengelolaan bencana; dan pembangunan perdesaan.
- b. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan : Rencanakan (*Plan*), Kerjakan apa yang telah direncanakan (*Do*), Periksa atau monitor pelaksanaan (*Check*), dan Aksi tindak lanjut).
- c. Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Taat dan sesuai aturan
 2. Sesuai dengan norma profesionalisme
 3. Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*Quality Result Driven*).
- d. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (*Money Follow Program Selected Policy*);

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 diperlukan penerapan kaidah-kaidah pelaksanaan seperti yang disebutkan sebelumnya, sehingga dalam tahap operasional akan dilanjutkan dengan pembuatan Rencana Kerja Rinci seperti penjadwalan peralatan, Sumber Daya Manusia dan Waktu Pelaksanaan, dimana akhir dari semua pelaksanaan akan dibuatkan laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.